

## KERAPUHAN SITEM KAPITALIS

Oleh : Sri Nawatmi  
Fakultas Ekonomi Unisbank Semarang

### Abstract

*The world economy was strike down by global financial crisis. It's happened because of subprime mortgage in US and then stock market in the world is fall. The bailout could not overcome the crisis and panic. Capitalism system had often caused crisis in many countries.*

*The base of capitalism is liberalism. Liberalism want to free market and refuse limitation from government and religion, so do neoliberalism. Neoliberalism push market power to comeback again after welfare state (1970). Actually, there are a lot of people give some critics about capitalism system. They know that capitalism arise exploitation from developed country to developing countries. There is no justice in that system.*

*All along twenty century, there are many crisis in various country every five years. That's all indicate, capitalism system is brittle. Because of that, we need other system economic like syariah economic system.*

*Key Words: financial crisis, capitalism system, liberalism, brittle*

### Pendahuluan

Krisis keuangan kembali menghantam dunia. Krisis berawal dari *subprime mortgage* yang merupakan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi warga AS yang kurang layak. Sebelumnya, kredit tersebut tahun 2000 - 2005 mengalami booming, mencapai 10 trilyun dolar, dimana tiga perempat kredit perumahan dikemas menjadi *mortgage-backed securities* (MBS) dan *collateralized debt obligation* (CDO). Dua pertiga debitur KPR memang berhak memperoleh kredit (*prime consumer*) dengan suku bunga tetap. Sepertiganya untuk *subprime* dengan suku bunga 2 - 3% lebih tinggi sehingga bisnis ini sangat menggiurkan dan ekspansif, padahal resiko *default* tinggi. Tetapi resiko sudah dialihkan dalam bentuk CDO yang dijual di pasar keuangan. Lagi pula resiko *default* selama ini ditutupi oleh harga rumah yang terus naik sejak 1987.

Bencana *subprime* mulai terjadi pertengahan 2005 dimana tingkat bunga melonjak sehingga menyebabkan nasabah KPR *subprime* mengalami *default*. Ditambah lagi, harga rumah mengalami penurunan, maka resiko *default* tidak lagi

bisa ditutup oleh harga rumah. Mengingat KPR *subprime mortgage* juga diperdagangkan melalui penerbitan instrumen derivatifnya (CDO, MBS dan lainnya sampai tujuh lapis) di pasar modal, kasus *default* juga merontokkan pasar keuangan di AS dan dunia yang memiliki instrumen derivatif CDO dan MBS dari KPR *subprime mortgage*. Sejak itulah dimulai episode kejatuhan bank investasi di AS dan Eropa yang kebetulan memegang instrumen derivatif tersebut.

Harga-harga saham di seluruh dunia berguguran. Dow Jones terjun bebas hampir 600 poin sebagai rekor terendah sejak empat tahun terakhir. Indeks saham lain di AS juga turun mencemaskan. Inilah wujud *the market failures* yang harus dipahami oleh para pengagum ideolog *laissez-faire*. Asumsi para fundamentalis pasar bahwa pasar *otomatically self-correcting*, serta *self-regulating* menunjukkan bukti keagalannya. Bahkan, dana talangan (*bailout*) USD 700 miliar di AS, 691 milyar dolar di Inggris, 680 milyar dolar di Jerman, 544 milyar dolar di Irlandia, 492 milyar dolar di Perancis, 200 milyar dolar di Rusia dan negara-negara di Asia sebesar 80 milyar dolar (Kompas 26/10) tidak juga meredam

krisis finansial dan kepanikan. Sistem kapitalisme dan ideologi neoliberalisme (khususnya di AS) mulai diragukan.

### **Keserakahan Kapitalisme**

Dalam sejarah Eropa, ada dua kejadian sejarah yang merupakan tonggak bagi lahirnya sistem kapitalisme yaitu : *pertama*, munculnya buku Adam Smith, *The Wealth of Nations : An Inquiry into the Nature and Causes* (1776). Buku ini merupakan proklamasi yang paling berhasil yang menyatakan bahwa keserakahan individu tidak bertentangan dengan kepentingan umum karena keserakahan harta benda akan mendorong orang bekerja keras untuk mencari keuntungan pribadi. Akibatnya dia akan memproduksi lebih banyak barang atau menjual lebih banyak jasa. Keserakahan satu orang akan diimbangi oleh keserakahan orang lain sehingga akan timbul kompetisi yang sehat. Dengan kompetisi bebas (*laissez-faire*) maka seorang buruh yang ditindas majikan, akan pindah ke majikan lain yang tidak menindas. Akibatnya, karena kekurangan pekerja maka majikan akan berkompromi dengan buruh untuk mengurangi atau menghapus penindasan. Dengan demikian, melalui persaingan bebas, penindasan dapat dicegah oleh *invisible hand* (Heilbroner, 1972 : 40 – 72). Keserakahan dan kepentingan pribadi menggerakkan mereka untuk melayani orang lain. Keserakahan dan kepentingan pribadi inilah yang dikelola sistem kapitalis, sehingga hasil secara keseluruhan menguntungkan orang banyak.

*Kedua*, Revolusi Perancis 1789 yang merupakan revolusi kaum borjuis pertama, yang terbesar dan tergemilang dalam sejarah umat manusia, menjadi lambang keruntuhan sistem feodal di Eropa. Sejak itu sistem kapitalis tinggal landas tanpa malu-malu melakukan keserakahan. Mengumpulkan harta benda secara serakah bukan lagi sesuatu yang rendah tapi bahkan dihormati terutama kalau berhasil gemilang. Orang kaya mulai memiliki status yang tinggi,

menggeser posisi bangsawan. Karena Adam Smith, maka keserakahan bukan lagi menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kepentingan umum, bahkan menjadi sesuatu yang berguna. Sistem kapitalisme merupakan sistem yang mengelola keserakahan individu menjadi motor pembangunan ekonomi. Pengelolaannya pun bersifat menjaga supaya pasar bebas tidak terganggu sehingga *tangan tak tampak* akan bekerja secara ajaib mengubah keserakahan pribadi menjadi penggerak yang bisa meningkatkan kesejahteraan umum, seperti yang dikatakan Milton Friedman.

Lama kelamaan keserakahan bukan saja dianggap berguna bagi kepentingan umum (bila dapat mengendalikannya dengan tepat seperti dalam sistem kapitalis), tetapi keserakahan dianggap sebagai kodrat atau hakekat manusia yang tidak dapat diubah. Kalau hipotesis ini diterima, maka kapitalisme yang mendasarkan diri pada konsep manusia serakah menjadi satu-satunya sistem yang terbaik dan paling mungkin dilaksanakan, sehingga sistem lain yang mau menggantikannya dianggap tidak realistis, utopis dan tidak dapat dilaksanakan.

Yang menjadi dasar tumbuhnya kapitalisme adalah liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Agama dianggap sebagai pengekangan terhadap potensi akal manusia. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap kepemilikan individu.

Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih, sedangkan masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas. Menurut John Locke filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah orang-orang yg memiliki hak untuk 'hidup, merdeka, dan sejahtera'. Orang-orang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk 'hancur', bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan.

Baru setelah terjadi Great Depression hingga awal 1970-an, wacana negara industri berubah mengarah ke konsep kesejahteraan, dimana kaum elit politik dan pengusaha berpendapat bahwa tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Dari hasil konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan PBB (1944) atau dikenal konferensi Bretton Wood menunjukkan bahwa anggota PBB lebih condong pada konsep negara kesejahteraan seperti yang digagas John Maynard Keynes agar tidak terulang lagi depresi ekonomi. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan kekalahan liberalisme.

Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, dimana akibat Amerika Serikat mendukung Israel dalam perang Yom Kippur, maka mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS

dan sekutu-sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia. Hal itu membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi tersebut muncul kembali ide liberalisme, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank.

Robert Nozick (1975) di Amerika Serikat mengeluarkan tulisan berjudul "*Anarchy, State, and Utopia*", yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum liberalis yang dikenal dengan istilah "Reaganomics". Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek "Thatcherisme". Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai "**Neoliberalisme**", yang disempurnakan oleh Mazhab Chicago dengan pelopornya Milton Friedman.

Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja. Hal itu sepenuhnya urusan antara pengusaha (pemilik modal) dan pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah. Privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, tetapi justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan

dan negara-negara miskin dan berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Menurut Neoliberal, nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.

Menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Dalam hal ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harus menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Jadi subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi, karena paham Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.

Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi. Misalnya sektor sumber daya air, program liberalisasi sektor sumber daya air implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema *watsal* atau *water resources sector adjustment loan*. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya *public goods* direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta

hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsorsium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional.

Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap dianggap sebagai Neoimperialisme.

Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh BUMN mereka. Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia, menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter di beberapa Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen keuangan AS dan Bank Dunia serta IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington.

Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi : (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.

Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda

krisis moneter pada pertengahan 1997. Menyusul kemerosotan nilai rupiah, pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkannya. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.

### Kritik Terhadap Kapitalisme

Dalam bukunya *The Death of Economics* (1994), ekonom Paul Ormerod mengkritik tentang ilmu ekonomi yang notabene adalah kapitalis yaitu di antaranya, rekomendasi IMF dan Bank Dunia tentang pelaksanaan sistem ekonomi pasar yang semurni-murninya bagi bekas Uni Sovyet tetapi ternyata perekonomian Uni Sovyet compang-camping penuh dengan kegiatan ekonomi bawah tanah seperti penyelundupan narkotika; kemudian negara dunia ketiga diminta untuk melakukan penghematan dan disiplin anggaran tetapi mereka sendiri justru sibuk menaikkan gaji sebesar 38% tahun 1992-1993 dan 22% tahun 1994; dikatakan bahwa perdagangan bebas antar negara akan menguntungkan semua pihak, padahal perdagangan bebas hanya akan menguntungkan dalam keadaan sangat khusus yaitu jika tingkat perekonomian pihak yang terlibat kurang lebih sama.

Di Indonesia sendiri, dasawarsa 1970-an muncul kontradiksi antara pertumbuhan dan pemerataan. Pemerintah membanggakan pertumbuhan ekonominya yang tinggi sementara mahasiswa menuntut keadilan pembagian kekayaan bagi rakyat. Pada tahun 1979, Mubyarto menawarkan

satu sistem yang disamping berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, juga mencoba memecahkan masalah pemerataan yaitu Sistem Perekonomian Pancasila (SPP). Tujuan yang berbeda tidak dapat dicapai hanya dengan mengubah kebijaksanaan serta strategi. Tetapi harus dengan cara mengubah teorinya. SPP adalah sistem ekonomi yang tidak mengandung aspek-aspek kapitalisme-liberalisme, statisme dan feodalisme. Kapitalisme ditolaknya karena hanya akan menumbuhkan golongan ekonomi kuat, sedangkan sosialisme ditolak karena sistem ini merupakan sistem ekonomi perencanaan, ekonomi peraturan, ekonomi negara yang menuju pada etatisme atau statisme.

Tokoh ekonomi rakyat lainnya yaitu Sri Edi Swasono mengatakan spread antara surat-surat kredit yang berkembang melalui jaminan-jaminan yang dijaminan berupa derivatif-derivatif yang dilakukan para kapitalis menjadi upaya licik terselubung bagaimana menciptakan kekayaan ("*creating wealth*") secara elusif (sukar difahami) dengan dampak delusif. Akibatnya, itu beredar menjadi modal-modal semu, sebagai *bubble loans*. *Spread* antara nilai intrinsik dan nilai nominal surat-surat kredit makin melebar. Makanya kerugian dari krisis di AS sekarang sangat luar biasa.

Menurut ekonom Syariah, Muhammad Syafii Antonio, sejak tahun 1907 hingga saat ini, penerapan system kapitalis sangat merugikan masyarakat. Hal itu karena dunia berulang kali menderita krisis akibat sistem itu. Meski krisis disebabkan oleh pelaku elit di sektor keuangan dan perbankan, yang paling banyak menderita adalah masyarakat karena dana pajak mereka digunakan untuk mengatasi krisis. Ini adalah wujud ketidakadilan.

Secara umum, kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan dengan negara-negara berkembang yang aset-asetnya telah dimiliki oleh pihak asing.

Negara-negara berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum terbangun tetapi telah dikuras sebagai akibat tidak terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal. Bahkan dalam gerakan neoliberal sendiri terdapat kritik mengenai banyaknya negara maju yang menuntut negara lain untuk meliberalisasi pasar mereka bagi barang-barang hasil industri mereka, sementara mereka sendiri melakukan proteksi terhadap pasar pertanian domestik mereka.

Pendukung antiglobalisasi adalah pihak yang paling lantang menentang neoliberalisme, terutama sekali dalam implementasi "pembebasan arus modal" tetapi tidak ada pembebasan arus tenaga kerja. Salah satu pendapat mereka, kebijakan neoliberal hanya mendorong sebuah "perlombaan menuju dasar" dalam arus modal menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh.

Antiglobalisasi adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "Antiglobalisasi" dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional dunia ketiga, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya.

Gerakan antiglobalisasi berkembang pada akhir abad ke-20 untuk melawan globalisasi aktivitas ekonomi korporasi dan perdagangan bebas dengan negara-negara berkembang. Para anggota gerakan anti-globalisasi ini biasanya mendukung alternatif-alternatif sosialis atau sosial demokrat terhadap ekonomi kapitalis, dan

berusaha melindungi penduduk dunia dan lingkungan hidup dari apa yang mereka yakini sebagai dampak globalisasi yang merusak. Dukungan untuk LSM hak asasi manusia adalah batu penjurus yang lain dari agenda gerakan anti-globalisasi. Mereka mendukung hak-hak buruh, gerakan untuk pelestarian lingkungan, feminisme, kebebasan untuk migrasi, pelestarian budaya masyarakat adat, keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, keamanan makanan, dan mengakhiri atau memperbaharui kapitalisme.

Pada umumnya, para pengunjung rasa percaya bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional merusak metode-metode pengambilan keputusan lokal. Banyak pemerintah dan lembaga-lembaga perdagangan bebas yang dilihat bertindak untuk kebaikan perusahaan-perusahaan transnasional/multinasional. Perusahaan-perusahaan itu dianggap mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia: bergerak bebas melintasi perbatasan, menggali sumber-sumber alam yang diinginkan, dan memanfaatkan keanekaragaman sumber-sumber manusia. Mereka dianggap mampu bergerak terus setelah melakukan kerusakan yang permanen terhadap modal alam dan keanekaragaman hayati suatu negara, dalam cara yang tidak mungkin dilakukan oleh warganegara di tempat itu. Para aktivis juga mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan itu memaksakan suatu "monokultur global". Karenanya, tujuan bersama dari sebagian gerakan itu adalah mengakhiri status hukum perusahaan-perusahaan itu sebagai subyek hukum dan pembubaran atau pembaruan dramatis atas Bank Dunia, IMF dan WTO.

Para aktivis secara khusus menggugat apa yang mereka lihat sebagai "penyalahgunaan globalisasi" dan institusi-institusi internasional yang dirasa mempromosikan neoliberalisme tanpa rasa hormat terhadap standart adat. Target umum meliputi Bank Dunia, Dana Moneter

Internasional (IMF), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta perjanjian "pasar bebas" seperti NAFTA, AFTA, Multilateral Agreement on Investment (MAI) dan (General Agreement on Tariff and trade (GATT). Mengingat kesenjangan ekonomi antara negara-negara kaya dan miskin, penganut gerakan ini mengklaim bahwa "pasar bebas" sesungguhnya akan menyebabkan bertambahnya kekuasaan negara-negara industri (sering diistilahkan sebagai "Utara" sebagai tandingan "Selatan" yang terdiri atas negara-negara berkembang).

Terkadang ada juga argumentasi bahwa AS mempunyai keuntungan khusus dalam ekonomi global karena hegemoni dolar. Klaim ini menyatakan bahwa dominasi dolar bukanlah semata-mata konsekuensi dari keunggulan ekonomi AS. Sejarahwan globalisasi mengakui bahwa dominasi dolar juga didapat melalui kesepakatan politis seperti Bretton Woods System dan perdagangan minyak OPEC hanya dalam dolar, setelah AS meninggalkan standar emas dan menggantikannya dengan dolar.

Banyak pihak melihat gerakan ini sebagai tanggapan kritis terhadap pengembangan neoliberalisme, yang secara luas dianggap telah dimulai oleh kebijakan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan menuju *kapitalisme laissez faire* pada tingkat global dengan mengembangkan privatisasi ekonomi negara-negara dan melemahkan peraturan perdagangan dan bisnis. Para penganjur neoliberal berpendapat bahwa peningkatan perdagangan bebas dan pengurangan sektor publik akan membawa manfaat bagi negara-negara miskin dan kepada orang-orang yang miskin di negara-negara kaya. Kebanyakan pendukung antiglobalisasi sangat tidak sependapat, dan menambahkan bahwa kebijakan neoliberal dapat menyebabkan hilangnya kedaulatan lembaga-lembaga demokratis.

### Rangkaian Krisis

Krisis demi krisis telah dialami oleh kapitalisme, baik sebagai sistem ekonomi maupun sistem pemikiran. Pada masa Depresi besar 1930-an, sistem ini diperkirakan sudah diujung tanduk atau ditepi jurang keruntuhan. Tetapi ternyata bisa diatasi dengan munculnya Keynes. Perang dunia kedua, sebenarnya juga manifestasi krisis kapitalisme dalam bentuk antagonisme antara negara-negara industri pertama dan negara-negara industri angkatan kedua yang diwakili Jerman, Itali dan Jepang. Krisis ini dapat diatasi dengan kekerasan yang dilambungkan oleh bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki kemudian Rencana Marshall berhasil menyelamatkan kapitalisme dengan kebangkitan bersama diantara negara-negara industri pertama dan angkatan kedua menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang kini disebut Blok Barat. Munculnya negara-negara industri baru juga dianggap sebagai bentuk kesuksesan kapitalisme sebagai sistem. Akhirnya kapitalisme telah bangkit menjadi paham yang perlu dipertahankan.

Padahal fakta menunjukkan bahwa sejarah kapitalisme adalah sejarah krisis. Karena krisis ekonomi dunia saat ini bukanlah yang pertama maupun yang terakhir.

Roy Davies dan Glyn Davies (1996) dalam buku *The History of Money from Ancient Time to Present Day*, menguraikan sejarah kronologi krisis ekonomi dunia secara menyeluruh. Menurut keduanya, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih dari 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Hal ini berarti, rata-rata setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.

Pada tahun 1907, terjadi krisis perbankan internasional dimulai di New York, setelah sebelumnya yakni mulai tahun 1860-1921 terjadi peningkatan jumlah bank di Amerika hingga 19 kali lipat. Selanjutnya, tahun 1920 terjadi depresi ekonomi di Jepang. Pada tahun 1922- 1923,

Jerman mengalami krisis dengan hyper inflasi. Karena takut nilai mata uang turun, gaji dibayar dua kali dalam sehari. Akibat krisis yang terjadi pada bank-bank di Taiwan, tahun 1927, krisis keuangan melanda Jepang (37 bank ditutup). Terjadi Great Crash di pasar modal New York dan Great Depression berupa kegagalan perbankan di US tahun 1929 – 1930 dimana net national product terpancang lebih dari setengahnya. Kemudian, akibat perbankan di Jerman jatuh, Austria mengalami krisis perbankan yang kemudian mengakibatkan mata uang internasional berfluktuasi. Fluktuasi tersebut menyebabkan Inggris meninggalkan sistem standar emas. Tahun 1944-1966, Perancis mengalami hyper inflasi akibat kebijakan liberalisasi ekonomi, sedangkan Hongaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk di Eropa.

Tahun 1945 – 1948, Jerman mengalami hyper inflasi akibat perang dunia ke dua. Selanjutnya tahun 1945 -1955, krisis perbankan di Nigeria karena pertumbuhan bank yang tidak teregulasi dengan baik. Tahun 1971, kesepakatan Bretton Woods dengan sistem fixed exchange ratenya runtuh. Tahun 1973 mulai mengglobalnya aktifitas spekulasi, baik di pasar modal, pasar uang, obligasi maupun pasar derivatif sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan floating exchange rate. Tahun 1973 – 1974 krisis perbankan kedua di Inggris dan juga krisis pasar Eurodolar (1974). Negara-negara industri mengalami Deep Recession (1978 – 1980) akibat boikot minyak oleh OPEC sehingga menyebabkan interest rate melambung tinggi. Krisis hutang dunia ketiga tahun 1980 karena negara maju meningkatkan tingkat bunga untuk menekan inflasi sehingga hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuannya. Tahun 1982 krisis hutang di Mexico disebabkan arus modal ke US yang massive yang kemudian di treatment dengan hutang dari IMF dan bank dunia. Krisis ini juga

menyeret krisis di Argentina, Brazil dan Venezuela. Terjadi Great Crash pasar modal di US dan UK (1982). Kemudian terjadi krisis lagi di Mexico (1994) akibat kebijakan finansial yang tidak tepat. Pada tahun 1997 – 2002, krisis keuangan melanda Asia Tenggara dimulai dari Thailand, Malaysia Indonesia maupun Korea. Tahun 1998, krisis keuangan di Rusia, Brazil dan Argentina (1999). Terakhir, 2007 hingga sekarang terjadi krisis keuangan yang dimulai dari Amerika Serikat. Akibat globalisasi, krisis keuangan tersebut meningkat frekuensi dan penyebarannya ke berbagai negara termasuk Indonesia dan yang mencemaskan tidak bisa diketahui sampai kapan krisis ini akan berakhir.

Nouriel Roubini, ekonom dari New York University, mengatakan krisis keuangan di AS masih akan memakan korban ratusan bank lagi di AS dan diperkirakan akan menelan kerugian akibat kredit macet sekitar dua trilyun dolar AS.

Keraguan dan ketidakpastian menumbuhkan kekhawatiran yang menyedot perhatian sehingga tak ada waktu untuk mengurus pembangunan sektor riil yang riskan. Kegiatan produktif anjlok. Diperkirakan akan ada dua puluh juta pekerja di seluruh dunia terancam di PHK. Ketakutan akan terjadinya resesi bukanlah mengada-ada. Prof Stiglitz yang bukan seorang *market fundamentalist* mengkhawatirkan lembaga keuangan AS lumpuh dan berhenti meminjamkan dana ke sektor riil. Ternyata, itu benar-benar terjadi.

### Kesimpulan

Seringnya terjadi krisis ekonomi di berbagai negara menunjukkan betapa rapuhnya sistem tersebut. Idealnya perekonomian digerakkan oleh sektor riil, tetapi kenyataannya dalam sistem kapitalis, perekonomian banyak digerakkan oleh spekulasi baik di pasar uang maupun di bursa saham.

Jadi sebenarnya, akar berbagai krisis yang terjadi hingga kini adalah karena

penerapan sistem kapitalis dimana sistem ini membolehkan pelaku bisnis melakukan spekulasi yang ditunjukkan oleh adanya transaksi derivatif sehingga sistem ini menyebabkan sektor non riil jauh lebih berkembang dibandingkan sektor riil. Sebelum krisis moneter di Asia tahun 1997/1998, dalam satu hari, dana yang beredar dalam transaksi semu di pasar modal dan pasar uang dunia diperkirakan rata-rata sekitar 2-3 trilyun dolar AS atau dalam setahun sekitar 700 trilyun dolar AS. Sebaliknya, arus perdagangan barang internasional dalam satu tahunnya hanya berkisar 7 trilyun dolar AS. Jadi, arus uang 10 kali lebih cepat dibandingkan arus barang (*Republika*, 18/8/2000)..

Kapitalisme telah gagal dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan manusia. Kapitalisme juga telah melahirkan kesenjangan ekonomi yang semakin parah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian lembaga the *New Economics Fondation* (NEF) Inggris, pada dekade 1980-an, dari setiap kenaikan pendapatan per kapita 100 dolar AS, kaum miskin hanya menikmati 2,2 dolar AS atau hanya 2,2%. Artinya 97,8% lainnya dinikmati golongan kaya. Kemudian kurun 1990 – 2001, setiap kenaikan pendapatan per kapita 100 dolar AS, maka yang dinikmati orang-orang miskin hanya 6 sen atau 0,6%. Berarti 99,4% dinikmati golongan kaya. Fakta tersebut juga ditunjukkan dalam *Human Development Report* 2006 yang diterbitkan UNDP (*United Nations Development Programme*), 10 % kelompok kaya dunia menguasai 54% total kekayaan dunia. Sedangkan sisanya 90% masyarakat dunia hanya menguasai total kekayaan 46%. Ini menunjukkan betapa telah terjadi ketidakadilan dan ketidakseimbangan.

Kegagalan kapitalisme telah mendorong ekonom lain untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang ada. Kalau kembali ke ekonomi sosialis, jelas tidak mungkin karena sejarah juga sudah menunjukkan adanya kegagalan. Alternatif

yang ada sekarang adalah tetap menggunakan sistem kapitalis yang ada akan tetapi dengan memperbaiki kelemahannya atau menggantinya dengan sistem ekonomi syariah yang sekarang mulai berkembang dan banyak yang melirikinya. Tetapi kalau kembali menggunakan sistem kapitalis, berapa kali lagi harus mengalami kegagalan ? atau mungkin memang manusia sulit untuk mengambil hikmah dari sejarah ?

### Daftar Pustaka

- Agustianto, 2008, Telaah Terhadap Akar Krisis Keuangan Global : Momentum Ekonomi Syariah sebagai Solusi, *agustianto.niriah.com*.
- Akhmad Kusaeni, Neoliberalisme Telah Mati, *Antara News* 9/10/2008.
- Arief Budiman, 1990, *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial Di Indonesia*, Gramedia.
- Didin Hafidhuddin, 2008, Hijrah Menuju Ekonomi Syariah, *Republika* 4/10/2008.
- ....., Berlabuh Ke Ekonomi Syariah, *Republika* 4/10/2008.
- ....., Cegah Krisis Dengan Penerapan Syariah, *Republika* 22/10/2008
- ....., Krisis Keuangan Belajar Dari Syariah, *Blog Fajri* 13/10/2008
- ....., Menguji Ketangguhan Kapitalisme, *Blog Fajri* 25/9/2008
- ....., Antisipasi Krisis Keuangan Global, *INDEF* 8/10/2008
- Martin Manurung, Neoliberalisme Kena Batunya, *Kompas.com* 8/10/2008
- M. Bachrul Ilmi, Saatnya Era Keuangan Syariah, *Republika* 16/10/2008.
- M. Dawam Raharjo, Editor, *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, LP3ES.

Mubyarto, Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi, *Jurnal Ekonomi Rakyat Th 1 No.7 September 2008*.

Paul Ormerod, 1998, *Matinya Ilmu Ekonomi (The Death of Economics)*, Gramedia.

Peter L. Berger, 1986, *Revolusi Kapitalis*, LP3ES.

Rahmad Budi Harto, Pesta Sudah Usai, *Republika 28/10/2008*.

Sri-Edi Swasono, Sistem Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ekonomi Rakyat Th 1 No. 2 April 2002*.

Sri-Edi Swasono, The End of Laissez-Faire, *search.yahoo.com 9/10/2008*.

Sunarsip, Membedah Anatomi Krisis AS, *Republika 21/10 2008*

William Ebenstein dan Edwin Fogelman, 1994, *Isme-isme Dewasa ini*, Edisi kesembilan, Erlangga.